

Dinamika Kemiskinan di Indonesia: Analisis Pembiayaan Syariah, Pendidikan dan Ketimpangan (2015-2025)

Enjang Ryan Firmansyah^{1)*}, Mohammad Hamdan Nurhadi²,
Umamah Mumtazah Askhiyah³, Syaeful Bakhri⁴, Abdul Aziz⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email : enjangryan2@gmail.com^{1)*}, hamdannurhadi4@gmail.com²⁾,
azzahmumtazah@mail.uinssc.ac.id³⁾, syaefulbakhri@syekh Nurjati.ac.id⁴⁾,
abdul.aziz@uinssc.ac.id⁵⁾

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan berjenis penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan merupakan sekunder yang berbentuk data panel. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Otoritas Jasa Keuangan. Rentang waktu penelitian ini adalah 2015-2025, mencakup 33 provinsi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan program *EViews 12*. Model data yang digunakan adalah Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Kata kunci: kemiskinan; ketimpangan; pembiayaan syariah; pendidikan.

Abstract

This study aims to examine the effect of Islamic financing, education, and inequality on poverty in Indonesia. This research employs a quantitative approach using secondary panel data. The data were obtained from the Central Statistics Agency and the Financial Services Authority. The observation period covers 2015–2025 and includes 33 provinces in Indonesia. The data analysis method used is descriptive quantitative analysis, assisted by *EViews 12* software. The model applied in this study is the Random Effects Model (REM). The results indicate that Islamic financing has a negative and significant effect on poverty, education has a negative and significant effect on poverty, and inequality has a positive and significant effect on poverty.

Keywords: *Education; Islamic financing; inequality; poverty.*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, dan distribusi kesejahteraan yang belum merata. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik sosial-ekonomi antar provinsi yang sangat beragam. Sebagian provinsi menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang relatif cepat, sedangkan sebagian lainnya menghadapi penurunan yang lebih lambat meskipun berbagai instrumen kebijakan telah dijalankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi faktor keuangan, modal manusia, dan distribusi pendapatan yang saling berinteraksi. Hal ini sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS (2026c) mengenai persentase penduduk miskin, berbagai provinsi di Indonesia mengalami tingkat kemiskinan

yang bervariasi. Namun secara umum tingkat kemiskinan Indonesia pada Semester 2 atau September tercatat sebesar 8,25%.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengentasan kemiskinan tidak hanya dimaknai sebagai penurunan jumlah penduduk miskin secara statistik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan ekonomi. Salah satu instrumen yang relevan dalam kerangka tersebut adalah pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah berpotensi memperluas akses modal, memperkuat sektor usaha produktif, dan mendorong aktivitas ekonomi riil, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki keterkaitan dengan penurunan kemiskinan. Pada level regional, pembiayaan syariah terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Aceh, sedangkan pada level kota, pembiayaan bank syariah juga ditemukan berkorelasi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Ternate (Rohmi et al., 2021). Berdasarkan data yang dirilis oleh OJK (2026) bahwa pembiayaan bank syariah di Indonesia untuk berbagai provinsi per bulan Desember tahun 2025 mempunyai total 684.917.065.250.562 atau 684,92 triliun rupiah.

Selain faktor keuangan, pendidikan merupakan determinan penting dalam penurunan kemiskinan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), produktivitas, kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar kerja, dan peluang dalam keberlanjutan pendapatan yang lebih baik (Bakhri et al., 2024). Dengan demikian, rata-rata lama sekolah dapat dipandang sebagai indikator kapasitas modal manusia yang relevan untuk menjelaskan dinamika kemiskinan. Temuan sebelumnya menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan indikator pembangunan manusia memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi kemiskinan di Indonesia maupun di tingkat daerah (Wulandari & Pratama, 2022). Sejalan dengan data yang dirilis oleh BPS (2026b) terkait pendidikan, rata-rata lama sekolah di berbagai daerah di Indonesia nilainya bervariasi. Namun secara umum per tahun 2025, Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah 9,07. Artinya, secara umum warga Indonesia menempuh pendidikan selama 9 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tuntutan ekonomi modern yang semakin kompetitif. Karena, rendahnya rata-rata lama sekolah dapat berdampak terhadap produktivitas tenaga kerja, tingkat pendapatan, hingga kemampuan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Di sisi lain, ketimpangan pendapatan merupakan faktor struktural yang dapat menghambat penurunan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi menunjukkan bahwa hasil pembangunan tidak terdistribusi secara proporsional kepada seluruh kelompok masyarakat. Dalam situasi demikian, pertumbuhan ekonomi maupun ekspansi pembiayaan tidak selalu secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi. Sejumlah studi menegaskan bahwa ketimpangan merupakan variabel penting dalam analisis kemiskinan wilayah dan perlu ditempatkan sebagai faktor inti dalam penjelasan kemiskinan antardaerah (Lestari & Busnetty, 2022). Menurut data yang dirilis oleh BPS (2026a) mengenai gini ratio, dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan di berbagai daerah di Indonesia nilainya juga bervariasi baik di perkotaan maupun pedesaan. Namun secara umum, data per semester 2 atau September 2025 tingkat ketimpangan Indonesia berada pada nilai 0,363. Nilai ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Indonesia masih berada pada tingkat ketimpangan sedang. Kondisi ini mengindikasikan adanya hasil pembangunan ekonomi yang belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan akses pendidikan, kesempatan kerja, kepemilikan aset, serta konsentrasi pembangunan antar wilayah.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas kemiskinan dari berbagai sudut pandang, hal tersebut masih terdapat beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian penelitian lebih menitikberatkan pada satu atau dua dimensi tertentu, seperti pembiayaan syariah, pendidikan, atau variabel pembangunan manusia, sehingga belum banyak yang menguji keterkaitan pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan secara simultan dalam satu model. Kedua, beberapa penelitian terdahulu masih berfokus pada wilayah yang terbatas, seperti kota atau satu provinsi tertentu, sehingga generalisasi temuan pada level nasional masih belum kuat. Ketiga, sebagian penelitian menggunakan periode pengamatan yang relatif lebih pendek, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika jangka menengah antar provinsi.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan dalam satu model empiris untuk menjelaskan tingkat kemiskinan. Kedua, penelitian ini menggunakan data panel provinsi di Indonesia selama periode 2015–2025, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap variasi antar wilayah dan antar kurun waktu. Ketiga, penelitian ini menempatkan isu keuangan syariah dalam dialog yang lebih langsung dengan dimensi pembangunan manusia dan keadilan distribusi, sehingga memberikan sudut pandang yang lebih utuh bagi kajian ekonomi syariah dan ekonomi pembangunan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan, dengan menggunakan pendekatan regresi data panel.

Kajian Teori

Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah fundamental yang masih menjadi tantangan pembangunan ekonomi di Indonesia hingga saat ini. Tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, kemiskinan juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan keuangan. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi, termasuk melalui penguatan sektor keuangan yang inklusif (Nengsih et al., 2021). Meskipun berbagai kebijakan fiskal dan moneter telah diterapkan, tingkat kemiskinan menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan penyediaan dana berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil, jual beli, atau sewa (Maulidina et al., 2023). Dalam praktiknya, pembiayaan syariah banyak diarahkan pada sektor produktif seperti UMKM, yang memiliki keterkaitan erat dengan pengurangan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pembiayaan syariah yang mendorong pertumbuhan usaha mikro melalui peningkatan omzet, tenaga kerja, dan aset usaha (Widarti et al., 2026).

Sedangkan unit usaha syariah merupakan bagian dari bank konvensional yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Unit usaha syariah memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia, bahkan dianggap lebih baik dibandingkan dengan bank anak perusahaan yang lain (Mainata, 2021). Dengan memanfaatkan jaringan bank konvensional, unit usaha syariah mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank syariah. Peran unit usaha syariah dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari ekspansi layanan keuangan syariah ke daerah terpencil, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, dan diversifikasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Aldiansyah et al., 2025).

Dalam konteks ekonomi Islam, keberadaan bank syariah dan unit usaha syariah menjadi instrumen penting dalam mendukung inklusi keuangan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba, yang secara teoritis memberikan peluang lebih besar bagi kelompok masyarakat miskin untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil dan produktif (Widarti et al., 2026). Skema pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada distribusi kesejahteraan yang lebih merata. Lebih jauh, penting untuk mengkaji sejauh mana pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penguatan sektor riil.

Secara konseptual, hubungan antara pembiayaan syariah dan pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi (Fadila et al., 2025). Inklusi keuangan memungkinkan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, untuk mengakses layanan keuangan formal yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan syariah memiliki dimensi sosial yang lebih kuat dibandingkan sistem konvensional. Prinsip profit and loss sharing (PLS) dalam akad seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan distribusi risiko yang lebih adil antara lembaga keuangan dan nasabah. Hal ini diharapkan mampu mendorong aktivitas UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Selain itu, pembiayaan syariah juga memiliki keterkaitan antara konsep maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan (Hamid & Aris, 2017). Dengan demikian, keberadaan bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial.

Literatur menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan pembiayaan syariah cenderung diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian empiris menemukan bahwa pembiayaan bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, terutama ketika diarahkan pada sektor produktif (Fadly et al., 2021). Di tingkat regional, studi literatur di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa pembiayaan syariah bersama variabel ekonomi lainnya berkontribusi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat (Butar & Tanjung, 2023). Meskipun secara teoritis pembiayaan syariah berpotensi mengurangi kemiskinan, hasil empiris menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengaruh pembiayaan syariah terhadap kemiskinan tidak selalu signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang memediasi hubungan tersebut.

Sebagai contoh, penelitian yang mengkaji pengaruh pembiayaan syariah, zakat, dan APBN menemukan bahwa pembiayaan syariah memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sementara zakat justru memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan (Ridlo & Muthohar, 2020). Temuan ini mengindikasikan bahwa instrumen keuangan sosial Islam memiliki peran yang lebih langsung dalam pengentasan kemiskinan dibandingkan pembiayaan komersial. Pada penelitian lain juga ditemukan hasil bahwa perbankan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses pada masyarakat kelas bawah dalam memenuhi persyaratan agunan yang ketat (Muhammad & Badri, 2025).

Selain itu, rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah juga menjadi kendala. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memiliki akses terhadap layanan perbankan, sehingga potensi pembiayaan syariah masih belum dimanfaatkan secara optimal (Maulidina et al., 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu adanya integrasi antara kebijakan keuangan syariah dan strategi inklusi keuangan nasional. Di sisi lain,

efektivitas pembiayaan syariah juga dipengaruhi oleh kualitas penyaluran pembiayaan. Pembiayaan yang lebih banyak terserap pada sektor konsumtif dibandingkan sektor produktif akan mengurangi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, orientasi pembiayaan menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitasnya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₁ : Pembiayaan syariah berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia

Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Pendidikan memegang peranan penting dalam mengatasi kemiskinan di suatu negara. Secara umum, pendidikan yang dijalani oleh seseorang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan individu.

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al. (2018) yang menyelidiki pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan perkapita, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan yang menggunakan data tahun 2012 sampai 2016 dinyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian lain yang dilakukan oleh Faradilah et al. (2023) menggunakan data observasi tahun 2018 sampai 2022 di Indonesia menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Muljaningsih (2022) yang menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang sama yaitu tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Susanto & Pangesti (2019) yang menganalisis di DKI Jakarta menunjukkan hasil yang sama yaitu tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan konsistensi bahwa pendidikan berperan sebagai instrumen penting dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan produktivitas, tetapi juga membuka akses terhadap peluang kerja yang lebih baik, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi strategi penting dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₂ : Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia

Pengaruh Ketimpangan terhadap Kemiskinan

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat tidak berlangsung secara proporsional, sehingga manfaat pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu dibandingkan kelompok lainnya. Dalam konteks ini, ketimpangan tidak hanya mencerminkan perbedaan tingkat kesejahteraan, tetapi juga menunjukkan adanya jurang akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan usaha, pendidikan, dan mobilitas sosial. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi pendapatan yang adil merupakan bagian penting dari terwujudnya keadilan sosial, karena kekayaan tidak semestinya berputar hanya pada kelompok tertentu, melainkan harus memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat (Syahputra et al., 2023).

Secara teoritis, ketimpangan yang tinggi cenderung memperbesar kemiskinan karena kelompok berpendapatan rendah tidak memperoleh bagian yang memadai dari hasil pertumbuhan ekonomi. Ketika distribusi pendapatan tidak merata, daya beli masyarakat bawah menjadi lemah, akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas, serta kemampuan rumah tangga miskin untuk keluar dari perangkap kemiskinan menjadi semakin

kecil. Dengan demikian, peningkatan pendapatan agregat dalam suatu wilayah tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan apabila distribusinya tetap timpang. Dalam kerangka ekonomi syariah, kondisi tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan kemaslahatan, sebab pemerataan pendapatan yang adil justru diperlukan agar hasil ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok kaya, tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat (Anggraini et al., 2024)

Hubungan antara ketimpangan dan kemiskinan juga dapat dijelaskan melalui mekanisme struktural. Semakin tinggi ketimpangan, semakin besar kemungkinan kelompok miskin tertinggal dalam akses modal, pekerjaan produktif, dan layanan publik. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi menjadi kurang inklusif karena hanya menguntungkan kelompok yang telah memiliki aset dan posisi ekonomi yang lebih kuat. Dalam situasi seperti itu, kemiskinan dapat bertahan meskipun perekonomian tumbuh. Oleh karena itu, ketimpangan bukan sekadar persoalan distribusi statistik, melainkan faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan itu sendiri (Syahputra et al., 2023)

Temuan empiris pada umumnya mendukung hubungan positif antara ketimpangan dan kemiskinan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Namun demikian, hasil empiris tidak selalu seragam di setiap wilayah, karena pada konteks tertentu ketimpangan juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh ketimpangan terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, struktur ekonomi, serta efektivitas kebijakan distribusi yang berjalan (Anggraini et al., 2024).

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa ketimpangan memiliki kecenderungan memperburuk kemiskinan karena distribusi hasil pembangunan yang tidak merata akan mempersempit peluang masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, dalam penelitian ini ketimpangan diduga berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula kecenderungan meningkatnya kemiskinan, oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H₃ : Ketimpangan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia

H₄ : Pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan di Indonesia

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis penelitian asosiatif, yang menguji pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya, sementara pendekatannya menggunakan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berbentuk data panel. Adapun data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rentang waktu penelitian ini adalah 2015 sampai 2025 yang terdiri dari 33 provinsi di Indonesia.

Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari Pembiayaan Bank Syariah (X_1) yang diambil dari data rata-rata total pembiayaan per tahun untuk masing-masing provinsi. Pendidikan (X_2) yang diambil dari data rata-rata lama sekolah masing-masing provinsi. Ketimpangan (X_3) yang diambil dari data gini ratio masing-masing provinsi, dan Kemiskinan (Y) yang diambil dari data persentase penduduk miskin masing-masing provinsi. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif yang mengurai pengaruh masing-masing variabel tidak terikat terhadap variabel terikat dengan menggunakan program *E-Views* 12.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Model Regresi Data Panel Uji Estimasi Model

Penentuan model regresi data panel dilakukan melalui serangkaian pengujian untuk memperoleh estimasi model yang paling sesuai. Tahap pertama dilakukan melalui uji Chow (Tabel 1) yang bertujuan membandingkan Common Effect Model (CEM) dengan Fixed Effect Model (FEM). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM).

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	542.977752	(32,327)	0.0000
Cross-section Chi-square	1448.910510	32	0.0000

Sumber : Diolah dari Output Eviews 12, 2026

Selanjutnya dilakukan uji Hausman (Tabel 2) untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Cross-section Random sebesar 0,0546, sehingga lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol diterima, sehingga model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Oleh karena itu, seluruh pengujian hipotesis dan interpretasi hasil penelitian selanjutnya didasarkan pada model REM.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	7.619367	3	0.0546

Sumber : Diolah dari Output Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil estimasi Random Effect Model (REM), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

Tabel 4. Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.829455	0.155162	31.12519	0.0000
LN_PEMBIAYAAN	-0.032519	0.010140	-3.207050	0.0015
LN_PENDIDIKAN	-0.959110	0.086634	-11.07077	0.0000
LN_KETIMPANGAN	0.255188	0.078665	3.243982	0.0013

Sumber : Diolah dari Output Eviews 12, 2026

$Kemiskinan = 4,829 - 0,033Pembiayaan - 0,959Pendidikan + 0,255Ketimpangan$.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dan pendidikan memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, sedangkan ketimpangan memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan. Artinya, peningkatan pembiayaan syariah dan pendidikan cenderung menurunkan tingkat kemiskinan, sementara peningkatan ketimpangan justru mendorong peningkatan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Koefisien regresi sebesar -0,0325 menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan syariah akan diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses modal bagi masyarakat, khususnya kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Tabel 5. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.829455	0.155162	31.12519	0.0000
LN_PEMBIAYAAN	-0.032519	0.010140	-3.207050	0.0015
LN_PENDIDIKAN	-0.959110	0.086634	-11.07077	0.0000
LN_KETIMPANGAN	0.255188	0.078665	3.243982	0.0013

Sumber : Diolah dari *Output Eviews 12, 2026*

Variabel pendidikan memiliki koefisien sebesar -0,9591 dan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia karena mampu meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan koefisien sebesar 0,2552. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang terjadi. Ketimpangan menyebabkan distribusi hasil pembangunan menjadi tidak merata sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat dinikmati secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 6. Uji Simultan

F-statistic	176.9301
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Diolah dari *Output Eviews 12, 2026*

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistic yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial secara bersamaan.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.596534
Adjusted R-squared	0.593163

Sumber : Diolah dari *Output Eviews 12, 2026*

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0,593163. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 59,3 persen variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan. Sementara itu, sebesar 40,7 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, pengeluaran pemerintah, zakat, maupun variabel sosial ekonomi lainnya yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai koefisien

determinasi yang relatif tinggi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan demikian, pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan dapat dianggap sebagai variabel penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan Syariah (X_1) terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai probability 0.0015 yang mana nilai tersebut lebih kecil 0.05 maka pembiayaan syariah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y). Dengan demikian maka H_1 diterima. Adapun pengaruh bersifat negatif, artinya semakin tinggi tingkat pembiayaan syariah maka tingkat kemiskinan semakin turun. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menurunkan tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Secara substantif, hasil ini dapat dijelaskan melalui karakteristik unik pada pembiayaan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Adanya skema pembiayaan syariah seperti mudharabah dan musarakah memungkinkan pelaku usaha khususnya UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa terbebani bunga tetap. Sehingga hal ini berdampak pada peningkatan produktivitas usaha, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan rumah tangga.

Secara empiris temuan ini sejalan dengan Fadly et al. (2021), Butar & Tanjung (2023), Fadila et al. (2025) yang meneliti di berbagai level nasional maupun regional di berbagai kota di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan temuan Muhammad Ziddan yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, hal ini terjadi karena adanya persyaratan agunan yang ketat sehingga dampak pembiayaan syariah hanya dinikmati oleh masyarakat kelompok atas (Muhammad & Badri, 2025). Penelitian lain menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berpengaruh negatif namun tidak signifikan, dikarenakan oleh efektivitas pembiayaan syariah yang masih kontekstual (Ridlo & Muthohar, 2020).

Pengaruh Pendidikan (X_2) terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai probability 0.0000 yang mana nilai tersebut lebih kecil 0.05 maka pendidikan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y). Dengan demikian maka H_2 diterima. Adapun pengaruh bersifat negatif, artinya semakin tinggi pendidikan maka tingkat kemiskinan akan semakin turun. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Secara substantif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dijalani oleh seseorang akan membuka kesempatan yang lebih besar dalam mengatasi masalah kemiskinan yang di alami masyarakat. Pendidikan dapat mendorong kemampuan seseorang dalam bekerja dan berinovasi. Hal ini memberikan dukungan bagi terserapnya angkatan kerja bagi masyarakat yang mana banyak lowongan pekerjaan melakukan rekrutmen dengan tingkat pendidikan dan kemampuan tertentu yang dipersyaratkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Azizah et al. (2018), Cahyani & Muljaningsih (2022), Susanto & Pangesti (2019) yang menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten di Indonesia. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Rahayu et al. (2022) Sinaga et al. (2023).

Pengaruh Ketimpangan (X_3) terhadap Kemiskinan (Y)

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai probability 0.0000 yang mana nilai tersebut lebih kecil 0.05 maka ketimpangan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (Y). Dengan demikian maka H_3 diterima. Adapun pengaruh bersifat positif, artinya semakin tinggi tingkat ketimpangan maka tingkat kemiskinan akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menghambat efek penurunan kemiskinan, karena hasil pembangunan lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan perluasan akses keuangan tidak akan optimal dalam menekan kemiskinan apabila tidak diikuti dengan distribusi hasil pembangunan yang lebih adil.

Temuan ini selaras dengan penelitian Lestari & Busnetty (2022) yang menegaskan bahwa kemiskinan antardaerah di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural ekonomi dan sosial, serta sejalan dengan penelitian Anggraini yang menempatkan ketimpangan pendapatan sebagai variabel penting dalam analisis kemiskinan wilayah. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar variabel pelengkap, melainkan faktor inti yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan.

Kontribusi tambahan dari penelitian ini adalah penunjukan bahwa meskipun pembiayaan syariah dan pendidikan terbukti menurunkan kemiskinan, pengaruh positif ketimpangan tetap kuat dalam model. Hal ini berarti bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya bergantung pada ekspansi pembiayaan dan peningkatan pendidikan, tetapi juga membutuhkan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata. Dalam perspektif ekonomi syariah, temuan ini relevan dengan prinsip keadilan distributif, yaitu bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan manfaat, bukan hanya peningkatan agregat ekonomi.

Secara umum, hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Dalam hal mengatasi ketimpangan, Islam memiliki mekanisme distributif yang unik tepatnya dalam keuangan sosial islam yang terdiri dari Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf. Di Indonesia, pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dikelola oleh BAZNAS, LAZ, dan UPZ. Sedangkan lembaga yang terkait dengan pengelolaan Wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, serta lembaga lainnya seperti Yayasan yang berperan sebagai nadzhir. Pujiyono et al. (2024) berpendapat bahwa keuangan sosial islam ini dapat menjadi suatu alternatif solusi guna memecahkan berbagai permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta distribusi kekayaan pada masyarakat. Keuangan islam terdiri dari 3 sektor, yaitu komersial, fiskal, dan sosial. Keuangan sosial islam yang terdiri dari Zakat dan Wakaf dapat mengisi celah dalam distribusi yang terjadi pada masyarakat yang berada pada kelas *low income society*. Sedangkan sektor komersial islam seperti Bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal mempunyai target kalangan *medium to high income society* (Beik 2019, dalam Bank Indonesia & Badan Wakaf Indonesia, n.d.). Berdasarkan keterangan tersebut komposisi dalam keuangan islam bisa saling mengisi celah dalam memaksimalkan hasilnya bagi masyarakat secara umum.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam analisis adalah *Random Effects Model (REM)* berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman. Secara parsial, pembiayaan syariah dan pendidikan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sedangkan ketimpangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan syariah mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif masyarakat sehingga

berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Selain itu, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan kesempatan kerja yang pada akhirnya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Sebaliknya, meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan akan memperbesar kesenjangan ekonomi sehingga mendorong meningkatnya kemiskinan. Secara simultan, pembiayaan syariah, pendidikan, dan ketimpangan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0,593 menunjukkan bahwa 59,3% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat kebijakan peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sebagai instrumen jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, pengembangan sektor keuangan syariah melalui peningkatan pembiayaan produktif bagi UMKM dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah perlu terus didorong agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Di sisi lain, upaya pengurangan ketimpangan melalui kebijakan distribusi pendapatan, penguatan program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta optimalisasi instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif perlu ditingkatkan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi, pengeluaran pemerintah, zakat, dan Indeks Pembangunan Manusia, agar diperoleh model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Referensi

- Aldiansyah, A., Isnaini, D., & Rusmiati, D. (2025). The effectiveness of sharia financing model in Bank Syariah Indonesia: Literature review perspective. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 11(1), 15–24. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v11i1.27916>
- Anggraini, N., Santosa, P. B., & Citaningati, P. R. (2024). Pengaruh Islamic Human Development Index, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan upah minimum kabupaten terhadap kemiskinan (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2009–2022). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10(3), 3143–3153. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15079>
- Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh pendidikan, pendapatan per kapita, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180. Received from <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6976/5908>
- Bakhri, S., Suharno, S., Ahmad, A. A., & Suyono, E. (2024). Social capital as a major factor of street vendors sustainability: An insight for public regulation policy in emerging economy. *Journal of Governance and Regulation*, 13(3), 105–114. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i3art9>
- Bank Indonesia, & Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). *Direktori pemberdayaan ZISWAF*.
- Badan Pusat Statistik. (2026a, May 14). *Gini ratio menurut provinsi dan daerah, 2025*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgJMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026b, May 14). *[Metode baru] rata-rata lama sekolah (tahun), 2025*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1zl=-/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026c, May 14). *Persentase penduduk miskin (P0) menurut provinsi dan daerah (persen), 2025*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkylzl=persentase-penduduk-miskin--september-2025.html>
- Butar, R. B., & Tanjung, A. A. (2023). Analisis pengaruh pembiayaan bank syariah, PDRB, dan pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera tahun 2016–2021. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(30), 402–420. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i1.17587>

- Cahyani, F. N., & Muljaningsih, S. (2022). Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 1-10. <http://dx.doi.org/10.35906/jep.v8i1.977>
- Fadila, D., Karimi, S., & Kamarni, N. (2025). Analisis pengaruh pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 7, 1–7. <https://doi.org/10.37034/infkeb.v7i3.1205>
- Fadly, F., Inat, F., Iryanto, M., & Quilim, C. A. (2021). Analisis pengaruh pembiayaan bank syariah, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 123–129. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1858>
- Faradilah, F., Sujianto, A. E., Rizqiyah, I., Mariani, E., Widyarningsih, W., & Sripto, A. A. (2023). Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5364–5371. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1937>
- Hamid, A., & Aris. (2017). Peran bank syariah dalam mengurangi kemiskinan. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, 15, 67–82. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.426>
- Lestari, W. I., & Busnetty, I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan per provinsi di Indonesia dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3136–3144. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6208>
- Mainata, D. (2021). Unit usaha syariah pada perbankan syariah: Tinjauan pustaka dengan bibliometrik. *AL-TIJARY*, 7(1), 79–94. <https://doi.org/10.21093/at.v7i1.4354>
- Maulidina, A., Nawawi, M. K., & Devi, A. (2023). Pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap kemiskinan di Indonesia. *EI-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(4):908-927. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2294>
- Muhammad, Z., & Badri, A. (2025). Analisis empiris hubungan lembaga keuangan syariah dan kemiskinan di Indonesia: Studi pada perbankan syariah, saham syariah, dan asuransi syariah. *Bisnis Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 164–171. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6064>
- Nengsih, T. A., Kurniawan, B., & Harsanti, E. F. (2021). Analisis keterhubungan tingkat kemiskinan dan pembiayaan syariah di Indonesia tahun 2005–2020. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 5(2), 223-229. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i2.1022>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2026, May 14). *Pembiayaan entitas bank umum syariah*. <https://data.ojk.go.id/SJKPublic/Dataset/Dataset/Dataset/355>
- Pujijono, A., Nurlia, Panggiarti, E. K., Agusti, N., Ningsih, R., Fauzi, U., Sulistyowati, S., Nengsih, I., & Hastuti, E. W. (2024). *Islamic social finance*. Azzahra Media Society.
- Rahayu, E. B. S., Moonti, U., Ardiansyah, A., Dama, M. N., Gani, I. P., & Toralawe, Y. (2022). Pengaruh jumlah tanggungan keluarga dan pendidikan terhadap kemiskinan. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 22-32. <https://doi.org/10.37479/jkeb.v15i1.15572>
- Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). Analisis pengaruh zakat, pembiayaan syariah, dan APBN terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 123–130. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1101>
- Rohmi, M. L., Jaya, T. J., & Fahlevi, M. R. (2021). Pengaruh pembiayaan syariah dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh: Analisis data panel. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1409–1415. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2602>
- Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutauruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh pendidikan, pendapatan per kapita, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuiilnomi*, 5(1). <https://doi.org/10.36985/ekuiilnomi.v5i1.699>
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economics*, 5(4), 340–350. <http://dx.doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>

- Syahputra, A., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2023). Distribusi pendapatan dan kemiskinan di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam: Tantangan dan prospek masa depan. 9, 144–161. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929>
- Widarti, M., Putri, D. S., & Sari, Y. (2026). Pengaruh pembiayaan bank syariah terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 289–296. <https://doi.org/10.61722/jemba.v3i1.1992>
- Wulandari, I., & Pratama, A. A. N. (2022). Analisis pengaruh dana ZIS (zakat, infak, sedekah), pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia periode 2010–2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3301–3309. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6501>